

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Burhan. (2011). *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenadaa Media Group.
- Moleong, L. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif* . Bandung: PT. Remaja rosdakarya .
- Mulyatiningsih, E. (2011). *Evaluasi proses suatu program* . Jakarta: Bumi aksara.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Erlangga.
- Posavac, E. (2014). *Program evaluation: methods and case studies* . Pearson: Education limited.
- Safi'i. (2009). *Manajemen pembangunan daerah "teori dan aplikasi"*. Malang: Averroes press.
- Salim, A. (2006). *Teori & paradigma penelitian sosial*. Yogyakarta: Tiara wacana.
- Sjafrijal. (2014). *Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi daerah* . Jakarta : PT. Raja grafindo persada.
- Suci, D. (2014). *Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa*. Yogyakarta: Forum pengembangan pembaruan desa.
- Sugiaro, E. (2015). *Menyusun proposal penelitian kualitatif skripsi dan tesis* . Yogyakarta: Suaka media.
- Wirawan. (2012). *Evaluasi "teori, model, standar, aplikasi dan profesi"*. Jakarta: Rajawali pers.

Jurnal Online & Skripsi :

- Akmara, R. G. (2016). *Implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) Berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015)*. Yogyakarta: Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta .
- Aritonang. (2016). Kebijakan desentralisasi untuk desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3).
- Ashari, D. d. (2013). *Pengelolaan keuangan dan aset desa*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE).

- Azra, H. B. (2010). *Implementasi kebijakan alokasi dana desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo)*. Yogyakarta: Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Candra Kusuma Putra, R. N. (n.d.). Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6).
- Drajat, E. Y. (2014). *Evaluasi program alokasi dana desa di kabupaten Natuna tahun 2012-2013*. Yogyakarta: Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Fanida, E. &. (2013). Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APDES) (studi pada alokasi dana desa tahun anggaran 2011 di Desa Sareng kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *E-Journal Unesa*.
- Hafid, R. (2017). *Skripsi pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep tahun 2016*. Makasar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- INDONESIA, S. (2016, Mei 23). Dewan Ngawi pasang target realisasi akibat ADD/DD minus. Ngawi, Jawa Timur , Indonesia .
- Juraidah. (2015). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Mendik karya Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. *E-Journal Administrasi Negara*, 3(4), 1145 - 1157 .
- Nanang, R. (2010). Implementasi kebijakan pembangunan desa dampaknya terhadap koordinasi UPTD dalam peningkatan kinerja pemerintahan desa dan efektivitas pembangunan desa. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 2(1), 31.
- Stephens, H. (2013). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 614.

Perundang-Undangan:

- Desa, T. P. (2007). Naskah Akademik RUU Tentang Desa. Jakarta: Depdagri.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 2.*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

Ibid, pasal 5 ayat 2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 19.

Ibid., pasal 19 dan 20.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23-24 tentang Desa.

Undang-Undnag Nomor 72 Tahun 2005 tenang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1 .

Undang-Undang Nomor 6 Pasal 78 Tahun 2014 Tentang Desa.